

# UPAYA KERJA SAMA MANAJEMEN BENCANA FILIPINA DENGAN *THE ASEAN COORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN AND DISASTER MANAGEMENT (AHA CENTRE)* DALAM MENINGKATKAN PLACE BRANDING NEGARA PASCA TOPAN HAIYAN 2013

Zumratul Haryani<sup>1)</sup>, Sukma Sushanti<sup>2)</sup>, D.A Wiwik Dharmiasih<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [zumratulharyani12@gmail.com](mailto:zumratulharyani12@gmail.com)<sup>1)</sup>, [sukmasushanti@gmail.com](mailto:sukmasushanti@gmail.com)<sup>2)</sup>, [wiwikd@unud.ac.id](mailto:wiwikd@unud.ac.id)<sup>3)</sup>,

## ABSTRACT

*This research aims to describe the Philippines' collaborative disaster management efforts with AHA Center to improving the country's place branding using qualitative methods. The natural disaster of Typhoon Haiyan in 2013 has damaged the Philippines' place branding. This effort to maintain the reputation of the Philippines as a country that has international tourism potential. The disaster prompted the Philippine government to collaborate in disaster management with the AHA Center to improve place branding after Typhoon Haiyan 2013. Therefore, researchers used a framework with the concept of regional disaster management and the place branding concept. The concept to answer The Philippines' collaboration in disaster management efforts with the AHA Center to improving place branding. This research found an answer, were several collaborative efforts wares made by the Philippines with the AHA Center to improving place branding after the occurrence of Typhoon Haiyan in 2013.*

*Keyword : Philippines, Regional Disaster Management, Place Branding, Typhoon Haiyan, AHA Centre.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kajian ilmu Hubungan Internasional kontemporer memasuki tahun 2000an menyoroti pentingnya *place branding* sebagai bentuk meningkatnya persaingan dan tekanan dari ekonomi global (Coaffee dan Rogers, 2008). *Place branding* suatu negara dapat berbentuk positif dan negatif. Suatu negara memiliki *place branding* yang positif bila negara menerapkan strategi dalam kebijakan yang dapat menciptakan dimensi yang baru dan lebih kuat untuk tujuan pembangunan, serta tata negara dan pemerintahan yang lebih

baik (Anholt, 2008). Sementara, *place branding* yang negatif dapat tercipta karena adanya ancaman seperti aksi teror, wabah penyakit, bencana alam dan ancaman lainnya (Coaffee dan Ham, 2008).

Bencana alam merupakan salah satu bentuk ancaman bagi keamanan suatu negara. Risiko keamanan yang disebabkan oleh bencana alam dapat berdampak negatif terhadap *place branding* negara tersebut. Menurut *Asian Disaster Reduction Centre (ADRC)* (2019) Filipina dilanda oleh 20 jenis topan per tahunnya, hal ini dikarenakan oleh letak geografis Filipina yang berada di Kawasan *Pacific Ring of Fire* atau dikenal

sebagai Kawasan Cincin Api memiliki kerentanan yang besar terhadap ancaman bencana alam yang tinggi.

*United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR) menyatakan sejak tahun 1995 hingga 2015, tercatat 274 bencana alam terjadi di Filipina yang meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi, siklon tropis, tanah longsor, serta banjir (GMA News, 2015). Menurut *World Risk Report* Filipina menempati posisi ketiga di dunia dengan kerentanan terhadap bencana alam dengan persentase indeks sebesar 25,14 persen (UNDDR, 2019). Kondisi tersebut memengaruhi keberlangsungan perekonomian Filipina terutama yang berasal dari sektor pariwisata. Sebagai negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara, Filipina memiliki 7.641 pulau (GOV.PH, n.d.) yang dikenal sebagai tujuan wisata, sehingga peran sektor pariwisata pada perekonomian Filipina cukup penting.

Namun, letak geografis Filipina yang berada pada lintasan Cincin Api menjadi tantangan bagi perekonomian Filipina yang bergantung pada sektor pariwisata. Sebagai contoh, pada November 2013 Filipina dilanda siklus tropis yang dikenal dengan Topan Haiyan (The Guardian, 2018). Topan Haiyan merupakan topan tropis terkuat di dunia yang pernah ada. Topan Haiyan dengan kecepatan angin 150-159mph (World Vision, 2013) melanda beberapa daerah di Filipina yang berada di kelompok pulau utama Visayas, seperti Samar Timur, Bohol, Layte, Cebu dan Panay yang berdampak terhadap sekitar 4,3 juta orang penduduk yang tinggal di wilayah tersebut (The Guardian, 2018). *The Guardian* (2018) melaporkan Topan Haiyan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang

diperkirakan mencapai 12 miliar hingga 15 miliar USD yang setara dengan 15 persen pengeluaran ekonomi Filipina.

Meskipun topan hanya melanda sekitar 21 persen wilayah Filipina, namun telah memengaruhi sektor pariwisata negara tersebut secara keseluruhan (The Guardians, 2013). Berbagai pemberitaan utama (*headlines*) yang melaporkan dampak Topan Haiyan menimbulkan kekhawatiran publik internasional terkait keamanan untuk mengunjungi Filipina. Hal tersebut memberikan pandangan negatif terkait keamanan *place branding* Filipina pasca bencana Topan Haiyan. *Place branding* negatif menyebabkan banyaknya terjadi pembatalan kunjungan di beberapa daerah tujuan wisatawan yang mencapai 30-40 persen (The Telegraph, 2013).

Munculnya berbagai opini terhadap kesiapsiagaan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana. *The Washington Post* (2013) memberitakan bahwa infrastruktur Filipina dianggap tidak mampu untuk menahan kekuatan topan. Selain itu, upaya mitigasi bencana Filipina dianggap belum siap sehingga tidak mampu mereduksi dampak bencana Topan Haiyan yang kuat. Hal ini diperkuat dengan kritikan dari masyarakat Filipina sendiri serta anggota parlemen yang berada di Provinsi Layte terhadap kelalaian Pemerintah Filipina dalam upaya kesiapsiagaan bencana (The Christian Science Monitor, 2013).

*Place branding* yang negatif ini kemudian memicu pemerintah untuk melakukan upaya manajemen bencana alam dengan melakukan koordinasi dengan ASEAN *Humanitarian Assistance Coordination Centre for Disaster Management* atau disingkat AHA

Centre pada tahun 2015. Filipina melakukan kerja sama dengan AHA Centre untuk membangun berbagai forum diskusi yang membahas terkait manajemen bencana, termasuk untuk mengidentifikasi pendekatan baru serta arah kebijakan yang berkelanjutan dalam mengurangi risiko bencana (Asia Society, 2015).

## Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis menarik suatu rumusan permasalahan apa upaya kerja sama manajemen bencana Filipina dengan AHA Centre dalam meningkatkan *place branding* pasca terjadinya Topan Haiyan tahun 2013.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Tulisan pertama yang peneliti gunakan adalah tulisan dari Raj Verma (2020) yang berjudul *Cina's Diplomacy and changing the COVID-19 Narrative*, sebagai kajian pustaka untuk menjelaskan penurunan reputasi negara yang disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam melakukan manajemen bencana secara nasional. Verma (2020) menganalisis upaya Pemerintah Cina dalam mengubah narasi COVID-19. Munculnya narasi Cina sebagai dalang dari munculnya bencana COVID-19 telah menyebar di seluruh media internasional. Hal ini memberikan penurunan kepercayaan publik terhadap kemampuan Cina dalam melakukan manajemen bencana. Faktor ini pula yang menyebabkan penurunan reputasi Cina di lingkungan internasional.

Tulisan kedua yaitu berasal dari Peter van Ham (2008) yang berjudul *Place branding:*

*The State of Art*, yang menjelaskan bahwa organisasi regional dapat mengubah reputasi suatu negara. Ham (2008) menyampaikan bahwa negara maupun organisasi regional dapat mengubah reputasinya. Tulisan Ham (2008:127) menggunakan studi kasus upaya Uni Eropa dalam mempertahankan reputasinya sebagai *global player*. Pada tulisannya Ham (2008) menggunakan gagasan *place branding* untuk menjelaskan bahwa suatu negara atau organisasi regional dapat dikenal melalui reputasi yang diciptakannya. Uni Eropa yang dijelaskan oleh Ham (2008) merepresentasikan komunitas bagi negara-negara anggotanya yang dapat memberikan *branding* positif dalam politik internasional.

Tulisan ketiga berasal dari Simon Hollis (2014) yang berjudul *The Global Standardization of Regional Disaster Risk Management* yaitu untuk membantu pemahaman penulis terhadap upaya Filipina dalam mewujudkan *place branding* yang positif dengan melakukan kerja sama dengan organisasi mitigasi bencana regional seperti AHA Centre. Tulisan Hollis (2014) membantu menjabarkan upaya negara yang cenderung menggunakan organisasi regional ketika sumber daya nasional yang dimiliki tidak mampu untuk melakukan manajemen bencana.

## 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Nazir (1985:84) merupakan metode penelitian dengan mencari fakta dalam fenomena sosial serta peristiwa alam yang selanjutnya dituangkan dengan

menggambarkan peristiwa tersebut dalam bentuk narasi. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Ulbert, 1999). Neuman dalam buku Martono (2015) menjelaskan penelitian deskriptif berguna untuk mendeskripsikan proses, mekanisme atau hubungan antar kelompok, memberikan gambaran secara verbal mengenai suatu penelitian serta menunjukkan dasar informasi mengenai latar belakang atau konteks tertentu tentang suatu gejala sosial.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan mengumpulkan data dari koran, artikel, buku, majalah, berita daring, jurnal, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan unit analisis yang digunakan adalah negara karena melihat perilaku Filipina sebagai negara dalam mengambil kebijakan untuk melakukan kerja sama dengan organisasi mitigasi bencana regional.

### **Kerangka Konseptual**

Peneliti menggunakan konsep *place branding* yang menjelaskan perilaku negara dalam meningkatkan reputasi negaranya di tingkat internasional. Ham (2008) menyatakan bahwa reputasi suatu negara akan mempengaruhi proses interaksinya dalam hubungan internasional, yaitu reputasi yang positif akan memberikan pengaruh positif dengan tingkat komersialitas yang tinggi bagi negara tersebut seperti menarik investasi ataupun untuk meningkatkan daya saing pariwisatanya.

Salah satu indikator negara dikatakan memiliki *place branding* yang positif adalah melalui tingkat keamanannya. Keamanan sendiri, telah menjadi subjek suatu tempat dalam mempertahankan reputasi (Coaffee and Rogers, 2008). Keamanan telah menjadi salah satu dari sekian banyaknya nilai jual dalam praktik *branding* suatu tempat. Coaffee dan Rogers (2008) menyoroti bagaimana aspek keamanan dan kesiapsiagaan darurat semakin terkait dengan praktik *branding* yang digunakan oleh negara untuk mempromosikan dan mecap negaranya sebagai tempat yang aman, terlindungi, serta aman dari serangan teror.

Selain itu, untuk memperoleh *place branding* pandangan Anholt (2008) menyatakan bahwa negara harus terlibat dengan dunia luar secara jelas, terkoordinasi dan komunikatif jika ingin memengaruhi opini publik. Anholt (2008) juga menegaskan bahwa *Place branding* lebih mengutamakan kebijakan yang memungkinkan tempat untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan keefektifan dalam mencapai citra yang lebih baik (Anholt, 2008)

Sedangkan, konsep Manajemen Bencana Regional menjelaskan perilaku negara melakukan hubungan kerja sama dengan organisasi regional atas dasar tuntutan dari dunia internasional, yaitu perkembangan tren kerja sama regional dalam bidang *Disaster Risk Management* (DRM) telah membentuk beberapa organisasi mitigasi bencana regional. Fenomena global yang dilakukan oleh beberapa organisasi regional di dunia mengakui pentingnya kerja sama kawasan dalam hal bencana alam (Hollis, 2004). Norma internasional yang mendorong negara-negara dikawasan untuk melakukan

kerja sama *Disaster Risk Management* (DRM) dengan organisasi regional, hal ini menurut Hollis (2014) menjadi titik awal negara-negara melakukan kerja sama dengan tujuan melakukan manajemen bencana dengan organisasi regional.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Filipina sebagai Destinasi Pariwisata**

Keindahan alam Filipina sebagai negara maritim telah menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun manca negara. Jumlah kunjungan wisatawan Filipina dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Filipina yang memiliki 7.641 pulau yang menawarkan kekayaan keanekaragaman hayati seperti hutan hujan tropis, hutan bakau, terumbu karang hingga pegunungan (Namria (2017). Pariwisata Filipina juga meningkatkan minat investasi dalam menunjang bisnis pariwisata di negara tersebut. Sejak tahun 2011 hingga 2015, pembangunan *resort-resort* di daerah tujuan wisata alam menjadi bisnis yang berkembang di Filipina.

Adapun beberapa daya tarik dari pariwisata Filipina diantaranya adalah :

##### **1. Pariwisata Permainan Kasino**

Perjudian seperti permainan kasino merupakan salah satu daya tarik yang ditawarkan oleh Pemerintah Filipina. IMF (2018) menyatakan bahwa permainan kasino berperan cukup penting bagi perekonomian dan menjadi salah satu ikon pariwisata Filipina. Pemerintah Filipina bahkan mendirikan *The Philippine Amusement and Gaming Corporation* (PAGCOR) tahun 1976

sebagai badan yang bertanggung jawab dan menaungi permainan kasino (*IMF Committee on Balance of Payments Statistics*, 2018:2). Pendapatan yang dihasilkan dari PAGCOR berkontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi Filipina (Asean Briefing, 2017).

Daya tarik industri kasino semakin meningkat sebagai tujuan wisata ketika Pemerintah Filipina meliberalisasi industri ini kepada pihak asing dan sektor swasta (IMF, 2018). Kontribusi industri kasino bagi GDP Filipina bahkan terus meningkat setiap tahunnya sejak 2016 dan telah menyumbangkan pendapatan kotor sekitar 158 miliar peso atau 3,3 miliar USD (Nikkei Asia, 2018). *Philippines Statistic Authority* (PSA) menunjukkan bahwa pariwisata memberikan kontribusi sebesar 8,6 persen dari GDP Filipina. Hal itu mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki infrastruktur pendukung industri kasino di tengah sentimen positif yang luar biasa dan advokasi untuk kasino sebagai katalisator untuk pertumbuhan dan regenerasi tujuan wisata. Namun sejak dibukanya *resort* terpadu Manila Bay, Solaira, pada tahun 2013, Pemerintah Filipina memiliki kekhawatiran terhadap persepsi citra destinasi negatif akibat bencana alam, insiden penculikan dan perselisihan politik dengan Tiongkok mengenai klaim wilayah di Laut Cina Selatan.

##### **2. Pariwisata Medis**

Wisata medis (*Medical Tourism*) di Filipina muncul pada akhir tahun 1990an dan berkembang pesat pada awal tahun 2000an. *Sunstar Philippine* (2016) melaporkan bahwa setiap tahun Filipina menerima kunjungan wisatawan medis yang mencapai 80.000

hingga 250.000 wisatawan. Tahun 2010, Filipina menempati posisi 11 sebagai tujuan wisata medis dunia, seperti nampak dalam Grafik 2.2. Wisatawan medis yang mendominasi datang dari Sri Lanka, Asia Timur, Eropa, Amerika, Utara dan Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik dan Australia (Sunstar Philippine, 2016). Filipina memiliki keuntungan dalam menyediakan layanan kesehatan karena kemampuan bahasa, sarana dan prasana, serta kearifan lokal, seperti dikutip dari pernyataan Cynthia C. Lazo, Direktur *Medical and Wellness Tourism* (Medical Tourism Magazine, 2020):

*“The Philippines has the advantage that many healthcare providers speak English, as well as the ability to provide modern medical facilities, quality infrastructure, proximity to most of Asia’s major cities, and the ability of a caring local community to help in total healing in mind, body and spirit.”*

Pemerintah Filipina mendirikan program *Philippine Medical Tourism Program* (PMTP) guna menaungi pembangunan berbagai infrastruktur seperti rumah sakit untuk mendukung perkembangan wisata medis (PICAZO, 2013: ix).

### **3. Pariwisata Alam dan Bisnis**

Filipina yang terdiri dari 7.000 pulau menjadikan negara tersebut salah satu destinasi alam populer di Kawasan Asia (UNWTO, 2014). Tahun 2011 hingga 2012, Pulau Borocay yang berada di Provinsi Aklan dinobatkan oleh *TripAdvisor* sebagai pantai terbaik kedua di dunia dan pertama di Asia

(ABS-CBN News, 2012). Tingkat kunjungan wisatawan ke Filipina menempatkan negara tersebut sebagai destinasi populer kelima di Kawasan Asia Pasifik dan ke 19 di seluruh dunia, dengan total 14 juta pengunjung (Pilapil-Anasco & Lizada, 2014). Pemerintah Filipina menyuguhkan wisata alam dengan mengembangkan ekowisata (*eco-tourism*) sejak tahun 2002 (National Ecotourism Strategy & Action Plan 2013–2022, 2013:4). Ekowisata bertujuan untuk mengajak wisatawan berkunjung ke alam guna meminimalisir kerusakan akibat pariwisata konvensional, memberikan keuntungan finansial bagi bisnis lokal dan membangun kesadaran Pemerintah Filipina terhadap ekowisata dapat memberdayakan komunitas lokal serta budaya mereka, dan mendukung hak-hak sipil (Philippines Travel Package, 2020).

Filipina, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, menawarkan salah satu tujuan ekowisata terbaik di Asia dan Kawasan ASEAN (National Ecotourism Strategy & Action Plan 2013–2022, 2013: 3). Produk ekowisata yang ditawarkan terdiri dari beragam deretan lahan basah, pegunungan, gunung berapi, tebing terjal, pemandangan laut, pantai, danau, hutan, gua, ladang, dan beragam jenis tumbuhan dan hewan. Salah satu wisata alam yang terkenal di Kepulauan Borocay yaitu *Tubbataha Reefs Natural Park* yang telah diakui sebagai situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1993 (Culture Trip, 2018).

Pengembangan program ekowisata di Filipina dilakukan oleh *Department of Tourism*

yang bekerja sama dengan *Department of Environment and Natural Resources–Biodiversity Management Bureau* (DENR-BMB) dengan merumuskan *National Ecotourism Strategy* (NES). Pemerintah Filipina melalui NES menjaga warisan alam dan budaya serta berbagi manfaat pariwisata secara umum kepada masyarakat setempat dan kelompok rentan. Pemerintah memprioritaskan pengembangan dan peningkatan pariwisata berbasis alam, dimana masyarakat lokal dan pengusaha lokal diberikan preferensi untuk distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas (*National Ecotourism Strategy & Action Plan 2013–2022*, 2013).

### **Kerentanan Filipina terhadap Bencana Alam**

Filipina merupakan salah satu negara di Kasawan Asia Tenggara yang sering mengalami bencana alam. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan Filipina rentan terhadap bencana alam, yaitu: *Pertama*, Faktor geografis karena Filipina berada pada garis lintas *Pacific Ring of Fire* (Kawasan Cincin Api). *Pacific Ring of Fire* (Kawasan Cincin Api) terdiri dari 450 rangkaian gunung berapi aktif dan tidak aktif menimbulkan sering terjadinya aktifitas gunung berapi dan terjadinya gempa bumi.

Filipina juga berada di Kawasan *Typhoon Alley* atau *Typhoon Belt* (Sabuk Topan) yang banyak menghasilkan badai siklon terutama di wilayah Luzon, Visayas, Kepulauan Batanes, dan Ilocos (Map Journal, n.d.). Menurut UNDRR (2019: 10) terdapat sekitar 20 siklon tropis yang melintas di perairan Filipina setiap tahunnya, dengan sekitar delapan atau sembilan jenis yang

berhasil mendarat. Hal itu menyebabkan Filipina menempati urutan keempat dari 15 wilayah yang menjadi lintasan topan (Map Journal, n.d.).

Perubahan iklim juga menyumbang sebagian besar kerentanan Filipina terhadap bencana alam seperti tanah longsor, angin topan dan banjir yang berdampak signifikan terhadap kerusakan infrastruktur dan ekonomi (UNDRR, 2019:10). Kerentanan tersebut juga didorong oleh sebagian besar mayoritas penduduk yang tinggal dalam jarak 60 km dari pantai (UNDRR, 2019). Kerusakan dan kematian di Filipina akibat bencana topan antara tahun 1970-2014 disebabkan oleh enam topan berskala super, termasuk Topan Haiyan (Espada, 2018). Wilayah yang paling rentan terhadap siklon tropis di negara ini adalah *National Capital Region* (NCR), Tagalog Selatan, Cagayan Valley, Central Luzon, *Cordillera Administrative Region*, dan provinsi Bicol (Cruz, et al., 2017). Visayas dan Mindanao juga menjadi wilayah yang lebih berisiko karena meningkatnya jumlah siklon tropis yang memasuki bagian selatan Filipina (UNDRR, 2019).

Selain itu, geomorfologi yang bervariasi memengaruhi distribusi bahaya. Kabupaten Baguio, misalnya, merupakan wilayah yang paling rawan longsor karena curah hujan tertinggi yang tercatat diakibatkan oleh interaksi musim hujan, siklon, dan pengangkatan udara secara orografis oleh Pegunungan Cordillera (Nolasco-Javier, et al., 2015). Sementara, banjir yang parah dan berulang sering terjadi di daerah dataran rendah (Bankoff, 2003). Gempa bumi juga cenderung memiliki karakteristik yang unik tergantung pada konteks lokalnya. Aktivitas seismik menghasilkan dampak sekunder yang

parah di daerah dengan kondisi tanah tanpa kohesi. Likuifasi tanah yang disebabkan oleh aktivitas gempa bumi merupakan perhatian yang signifikan di Luzon tengah, terutama di Provinsi Pangasinan dan Tarlac (Bankoff, 2003). Kerentanan bencana ini kemudian menjadi ancaman bagi masa depan Filipina.

Filipina termasuk di antara negara-negara yang berisiko terkena dampak buruk perubahan iklim karena sistem ekologi yang sensitif termasuk terumbu karang dan fauna laut (World Bank Blogs, 2013). Sejumlah besar populasi pesisir yang sering terpapar cuaca ekstrem kemungkinan besar akan mengalami intensitas bencana yang lebih buruk, efek perubahan iklim dipertimbangkan menjadi faktor kunci yang berkontribusi terhadap terjadinya topan yang lebih kuat, kenaikan permukaan laut, dan gelombang badai yang meningkat di wilayah pesisir (World Bank, 2021) Gelombang badai yang meningkat diperkirakan akan memengaruhi lebih dari 40 persen populasi pesisir yang tinggal di permukiman informal dan kemungkinan besar akan menghadapi dampak pertama dari peningkatan gelombang badai dan banjir (UNDRR, 2019:10)

*Kedua*, Faktor Urbanisasi yaitu salah satu faktor penyumbang terjadinya bencana alam di Filipina, seperti laporan yang dikeluarkan oleh *World Bank* (2015) bahwa Filipina memiliki tingkat urbanisasi tercepat di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Data statistik tahun 2009 hingga 2019 menunjukkan peningkatan angka urbanisasi di Filipina. Pada tahun 2019, sebesar 47,15 persen dari penduduk Filipina tinggal di wilayah perkotaan Statista (n.d.). Tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan berkurangnya lahan dan perumahan yang terjangkau. Hal ini kemudian

membuat sejumlah penduduk perkotaan yang berpenghasilan rendah membangun rumah di daerah yang berisiko tinggi seperti daerah aliran sungai, dataran banjir, lereng gunung dan kanal (Norwegian Refugee Council, 2014). Lanskap perkotaan yang menjadi tidak teratur kemudian merusak dan mengganggu saluran air, menghambat pemeliharaan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir di wilayah perkotaan.

### **Bencana Topan Haiyan Tahun 2013**

Topan Haiyan melanda Filipina pada Jumat, 08 November 2013 (NDMRRC, 2014). Peristiwa tersebut terjadi selama 16 jam dan memberikan dampak kepada sekitar 10 persen populasi negara. Topan Haiyan memiliki kecepatan angin 315 kilometer per jam atau 195 mph dan kekuatan angin sebesar 380 kilometer per jam atau 235 mph (CNN, 2013). Ketika itu, Topan Haiyan masuk ke dalam lima kategori topan terkuat di dunia dan menghantam sekitar 25 juta orang di jalurnya pergerakannya, yaitu dari Vietnam, Taiwan, Filipina dan Cina (Permatasari, 2016).

Topan Haiyan awalnya muncul pada pagi hari tanggal 4 November 2013 di Samudra Pasifik, timur laut New Guinea, dan bergerak secara intensif ke barat laut menuju Filipina (Permatasari, 2016). Tanggal 6 November 2013, Topan Haiyan memasuki *Philippines Area of Responsibility* (PAR) dan secara lokal diberi nama Topan Yolanda (NDRRMC, 2014). Selanjutnya intensitas Topan Haiyan meningkat selama kurun waktu dua hari yaitu pada tanggal 7 dan 8 November 2013 hingga pada akhirnya intensitas Topan Haiyan melemah saat bergerak menuju Laut Filipina Barat dan pada tanggal 9 November

2013 pukul 15:30 dinyatakan berada di luar PAR, Jalur pergerakan Topan Haiyan, Penulis tampilan dalam Gambar berikut (*Washington Post*, 2013).



Sumber : Wangshington Post (2013)

Total kerusakan yang diakibatkan oleh Topan Haiyan mencapai 21 persen dari wilayah Filipina dan menimbulkan kerugian ekonomi dan infrastruktur senilai 12,9 USD (World Bank, 2013). *Relief Web* (2017) menyebutkan bahwa tingkat perekonomian nasional Filipina melambat satu persen pada tahun 2013 dan 0,3 persen pada tahun 2014. PBB bahkan melaporkan bahwa sekitar 11 juta orang terdampak akibat Topan Haiyan di Kota Tacloban sendiri (BBC, 2013). Dampak topan telah mempengaruhi lebih dari 14 juta orang di 44 provinsi, menggusur 4,1 juta orang, menewaskan lebih dari 6.000 orang dan menyebabkan 1.800 orang hilang. Selain itu, Topan telah mengganggu mata pencaharian 5,9 juta pekerja. Kerusakan keseluruhan diperkirakan mencapai \$5,8 miliar (World Vision, 2013)

Berbagai kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh bencana Topan Haiyan memunculkan kritikan terhadap Presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino (Carlos dan Salazar, 2015). Kritikan tersebut terutama berasal dari beberapa pemerintah daerah yang mengalami kerusakan cukup parah

akibat Topan Haiyan. Pemerintah Filipina dianggap kurang memiliki kesiagaan dalam upaya mitigasi bencana terutama yang disebabkan oleh topan.

### Dampak Terhadap *Place Branding* Filipina

Kerusakan yang dialami Filipina akibat Topan Haiyan juga membuat negara tersebut menjadi sorotan dunia internasional. Media internasional memberitakan keadaan yang cukup parah dengan menampilkan gambar-gambar wilayah serta jumlah korban jiwa yang cukup membuat panik publik internasional untuk berkunjung ke Filipina. Kekhawatiran publik Internasional untuk mengunjungi Filipina kemudian berdampak buruk pada *place branding* Filipina dimata publik ingtrensional menjadi negatif, hal ini menurut Verma (2020) bahwa persepsi publik internasional dapat berubah negatif ketika negara tidak mampu melakukan pengendalian bencana secara nasional. Publik internasional menilai Pemerintah Filipina tidak mampu dalam menjamin keamanan wilayahnya dari bencana alam seperti Topan Haiyan. Ketidakpercayaan publik internasional tersebut memengaruhi *place branding* Filipina sebagai daerah tujuan wisata yang menyebabkan banyaknya pembatalan penerbangan wisatawan. Ketidakmampuan Filipina dalam menanggulangi bencana Topan Haiyan menurut Khazai *et al* (2017: 4) disebabkan oleh lambannya respon pemerintah dalam pemulihan pasca terjadinya bencana. Sehingga, banyak wisatawan yang merasa daerah-daerah wisata yang terdampak belum mampu menerima wisatawan, seperti Kepulauan Visayas.

Penurunan kunjungan juga dirasakan oleh industri pariwisata medis yaitu terlihat dari dua rumah sakit di Visayas Timur, *Eastern Visayas Regional Medical Center* yang terletak di Kota Tacloban dan *Ormoc District Hospital* yang berada di Ormoc (Leonhout et al., 2018). Hal ini dikritik oleh publik internasional terkait manajemen bencana Filipina (Leonhout et al., 2018). Penurunan kunjungan terhadap dua Rumah Sakit merupakan salah satu dampak negatif terhadap *place branding* Filipina sebagai salah satu destinasi pariwisata medis. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Filipina harus mampu meyakinkan dunia internasional terkait kemampuan negaranya dalam mitigasi bencana. Oleh karenanya Filipina melakukan kerja sama dengan AHA Centre selaku organisasi mitigasi bencana regional yang berada di kawasan.

### **Kelemahan Mitigasi Filipina Menghadapi Bencana Topan Haiyan**

Munculnya banyak kritikan terhadap pemerintah Filipina dalam upayanya melakukan manajemen bencana dalam menangani Topan Haiyan. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Filipina dalam melakukan manajemen bencana secara nasional. Meskipun Filipina telah memiliki beberapa peraturan terkait manajemen bencana nasional, Namun hal tersebut belum mampu untuk meningkatkan kualitas manajemen bencana Filipina. Adapun beberapa peraturan manajemen bencana yang dimiliki oleh Filipina diantaranya adalah : *Pertama, Republic Act 10121 Tahun 2010, The Enactment of the Climate Change Act tahun 2009, peraturan presiden terkait National Building Code tahun*

*1977, peraturan terkait Comprehensive Land Use Plan (CLUP) tahun 2015.* Namun, peraturan-peraturan tersebut belum mampu untuk memberikan pengaruh untuk mengurangi risiko bencana pada saat terjadinya Topan Haiyan. Peraturan tersebut belum mampu untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatan terhadap bangunan-bangunan yang dianggap kokoh belum pada saat topan karena konstruksi bangunan yang lemah (*Fox News, 2015*), tidak mampu untuk melindungi penduduk yang tinggal di sepanjang pesisir pantai di Provinsi Samar Timur dan menjadi korban terjangkit Topan Haiyan (Carlos dan Salazar, 2015).

Kelemahan manajemen bencana Filipina juga ditunjukkan dalam penelitian Trajano (2016) yang menyebutkan kurangnya koordinasi antar lembaga masyarakat, pemerintah, lembaga swasta dan lembaga internasional juga menjadi penyebab lemahnya Pemerintah Filipina dalam menanggapi dampak Topan Haiyan, selain itu kelemahan Filipina dalam upaya manajemen bencana juga terlihat pada proses early warning yang begitu lamban dilakukan. Pemerintah Filipina gagal dalam memberikan peringatan dini terkait Topan Haiyan yang datang tiga jam lebih awal (Ratha dan Mahapatra, 2014: 7).

Pasca terjadi topan Presiden Aquino mendirikan *Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery (OPARR)* melalui Memorandum Order No. 62 (Yolanda CRRP, 2014: 10). Namun, kinerja OPARR dinilai kurang efektif karena tidak mampu mengkoordinasikan penyaluran bantuan dan menyebabkan pemerintah daerah kewalahan (Carlos dan Salazar, 2015).

## **ASEAN Coordinating and Humanitarian Assistance (AHA Centre)**

Organisasi mitigasi bencana regional menjadi tren kerja sama di setiap kawasan. Studi yang dilakukan oleh Hollis (2014) menyatakan bahwa norma internasional telah mendorong negara untuk ikut serta dalam manajemen bencana regional, selain itu Hollis (2014:320) menyatakan bahwa tren kerja sama tersebut merupakan bentuk pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi kehidupan warga negara dan meminimalisir kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam, dan kerja sama tersebut dapat meningkatkan kapasitas perlindungan negara. AHA Centre di kawasan Asia Tenggara merupakan lembaga manajemen bencana regional yang dibentuk pada KTT ASEAN di Bali pada November 2011 (BPPT, 2011). Pembentukan AHA Centre bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar negara anggota ASEAN dan dengan organisasi internasional lainnya, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), serta organisasi lainnya dalam manajemen bencana dan tanggap darurat di kawasan ASEAN (AHA Centre, 2017). AHA Centre dapat menawarkan bantuan kemanusiaan serta dapat mengirimkan tim penilai ke negara anggota yang terdampak bencana (BBC Indonesia, 2017).

## **Upaya Kerja Sama Filipina dengan AHA Centre dalam Upaya Manajemen Bencana**

Filipina yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN melakukan kerja sama dengan badan mitigasi bencana regional

yaitu AHA Centre, untuk merespon bencana Topan Haiyan. Upaya Filipina melakukan kerja sama dengan AHA Centre selain untuk meningkatkan upaya manajemen bencana juga untuk membantunya dalam upaya respon terhadap topan haiyan hal ini juga dilakukan oleh Filipina untuk memperoleh kepercayaan dari dunia internasional, hal ini sejalan dengan pemikiran Hollis (2014). Langkah Pemerintah Filipina meminta bantuan AHA Centre dalam merespon bencana Topan Haiyan melalui Sekretaris Jenderal ASEAN saat itu, H.E. Le Luong Minh (ASEAN, 2017) sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Hollis (2014) yang menyatakan bahwa organisasi mitigasi bencana regional berperan dalam memberikan perlindungan bagi negara-negara anggota, untuk itu AHA Centre hadir di kawasan ASEAN untuk menjadi wadah dalam penyaluran bantuan oleh negara-negara anggota salah satunya pada upaya manajemen bencana pasca terjadinya topan Haiyan tahun 2013 baik itu dalam bentuk persiapan maupun pasca terjadinya bencana. Melalui AHA Centre negara-negara anggota seperti Malaysia, Thailand, Indonesia dan Brunei Darussalam, kemudian memberikan bantuan kepada Filipina (The AHA Centre News Bulletin, 2016). AHA Centre (2016) saat itu mengambil peran sebagai fasilitator bagi negara-negara anggota ASEAN yang ingin memberikan bantuan kepada Filipina.

Meskipun AHA Centre baru berdiri selama dua tahun pada saat terjadinya Topan Haiyan, namun beban yang diemban oleh Filipina pasca terjadinya Topan Haiyan cukup banyak dalam upaya manajemen bencana, hal ini juga sesuai dengan pernyataan Hollis (2014) bahwa negara akan memilih membagi beban tanggung jawab dengan melakukan

kerja sama secara regional, yang mana organisasi regional dapat menjadi sarana dalam mencapai kepentingan publik dalam tingkat upaya perlindungan negara. Hal ini juga sejalan dengan tujuan didirikannya AHA Centre yang memiliki fungsi sebagai fasilitator kerja sama dan koordinasi baik yang bersifat internal dengan negara anggota ASEAN maupun aktor lain diluar kawasan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional manajemen bencana lainnya (AHA Centre, 2016). Penulis melihat bahwa jangkauan aktor yang dimiliki oleh AHA Centre lebih luas dalam mempercepat proses manajemen bencana pasca topan haiyan. Upaya kerja sama oleh Filipina dengan AHA Centre juga dilakukan berdasar pada beberapa program unggulan yang dirancang oleh ASEAN, salah satunya adalah Visi ASEAN 2015 yang mencita-citakan ASEAN menjadi pemimpin global dalam upaya manajemen bencana (AHA Centre, 2016).

Pemerintah Filipina melakukan kerja sama dengan AHA Centre sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kemampuan manajemen bencana seperti *Preparedness, prevention, response* dan *recovery* yaitu: *pertama*, pada fase *preparedness* Filipina menggunakan sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh AHA Centre yaitu *Disaster Monitoring and Response System* (DMRS) yaitu sistem yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat internasional khususnya negara anggota ASEAN bahwa Filipina sedang berada dalam situasi yang membutuhkan bantuan (AHA Centre, 2016). *Kedua*, yaitu Fase *Prevention*, pada fase ini Filipina melakukan kolaborasi dengan ASEAN-ERAT sebagai personel untuk melakukan persiapan

sebelum terjadinya bencana, ASEAN-ERAT dikelola oleh AHA Centre yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan titik pusat mobilisasi sumber daya ke wilayah terdampak bencana di kawasan. Fungsi ASEAN-ERAT adalah untuk mendukung *National Focal Point* dan *Competent Authorities* negara anggota yang terkena bencana pada tahap awal bencana (Amri, A., 2014). Pada tanggal 08 November 2013, dua personel ASEAN-ERAT tiba di Manila untuk ikut dalam upaya persiapan sebelum terjadinya bencana. Personel ASEAN-ERAT merancang alat komunikasi darurat sebelum topan Haiyan mendarat yang berada di Tacloban, untuk mengirim informasi ke Ibu Kota Manila (AHA Centre, 2016).

*Ketiga*, yaitu fase *Response* yaitu kerja sama yang dilakukan oleh Filipina dengan AHA Centre yang dijadikan sebagai fasilitator dalam menyalurkan bantuan-bantuan dari negara anggota ASEAN. Seperti nampak pada gambar berikut yaitu penyaluran bantuan oleh Burnei Darussalam yang tiba di Kota Tacloban.



Sumber: AHA Centre (2016:12)

Selama proses tersebut berlangsung, lembaga manajemen bencana nasional dari negara anggota yang memberikan bantuan menggunakan formulir *Standard Operating Procedures for Regional Standby*

*Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP)* dan mengirimkannya ke AHA Centre (The AHA Centre News Bulletin, 2016). AHA Centre juga berkoordinasi dengan otoritas lokal dalam memastikan kelancaran transportasi bantuan melalui transportasi darat, udara maupun laut (Permatasari, 2016).

*Keempat, Fase Recovery* atau pemulihan menurut Cappola (2016:299) adalah salah satu fase yang ketika negara, individu maupun komunitas melakukan pemulihan atas bencana yang terjadi dengan cara merekonstruksi ataupun memperbaiki kembali harta benda yang hilang akibat bencana alam yang terjadi, fase ini juga menjadi tahap mengurangi risiko bencana serupa yang akan terjadi pada masa depan. Pada tahap pemulihan ini perencanaan dalam upaya manajemen bencana dirancang untuk diterapkan oleh suatu komunitas atau negara untuk menghadapi bencana di masa depan (Cappola, 2016:301). Sejalan dengan pernyataan Cappola (2016) Upaya *recovery* yang dilakukan oleh pemerintah Filipina pasca terjadinya Topan Haiyan dengan menguatkan dan membangun pemahaman terkait manajemen bencana yang lebih baik dengan berkerja sama dengan AHA Centre pemerintah Filipina juga mengikuti *AHA Centre Executive (ACE) Programme* yang ditawarkan oleh AHA Centre untuk melatih generasi muda agar tanggap terhadap bencana. Program tersebut berlangsung selama enam bulan dan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan bagi generasi muda terkait tanggap bencana (The AHA Centre News Bulletin, 2016). Program ACE merupakan program yang dibentuk oleh AHA Centre untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

teknis, yang berisikan pengenalan prosedur koordinasi tanggap bencana tepat waktu, perencanaan logistik untuk tanggap darurat, dan membentuk ikatan di antara peserta (The AHA Centre News Bulletin, 2016). Program ini membuat peserta bertukar pengetahuan, solusi, dan keterampilan dengan para ahli manajemen bencana.

Kerja sama yang dilakukan Pemerintah Filipina dengan AHA Centre merupakan salah satu bentuk upaya memperbaiki manajemen bencana untuk meningkatkan *place branding* yang menjadi negatif akibat Topan Haiyan. Tindakan Filipina sejalan dengan pendapat Anholt (2008) yang menyebut bahwa negara harus terlibat dengan dunia luar secara jelas, terkoordinasi dan komunikatif jika ingin memengaruhi opini publik. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina dengan AHA Centre pasca Topan Haiyan, yaitu: pertama, menyelenggarakan forum diskusi yang membahas manajemen bencana melalui *Asian Institute of Management* pada tahun 2015. Forum diskusi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan baru serta arah kebijakan yang berkelanjutan dalam mengurangi risiko bencana (Asia Society, 2015).

*Kedua*, meningkatkan kepercayaan publik pasca terjadinya Topan Haiyan yang sejalan dengan *ASEAN Vision 2015* yaitu menjadikan ASEAN sebagai pemimpin global dalam bidang manajemen bencana. Ketiga, mengikuti *ASEAN Strategic Policy Dialogue on Disaster Management (SPDDM)* untuk membentuk manajemen bencana dengan menyiapkan struktur dan strategi jangka pendek dan jangka panjang (The AHA Centre News Buletin, 2016). Pemerintah Filipina

melihat dengan mengikuti kegiatan tahunan seperti SPDDM mampu mempromosikan peningkatan manajemen bencana dan membangun jaringan yang lebih luas seperti dengan melibatkan sektor swasta. Upaya Filipina melakukan kerja sama dengan ikut serta dalam kegiatan tahunan seperti SPDDM dapat membantu pembentukan *place branding* sebagaimana disampaikan oleh Ham (2008:128), bahwa *place branding* dapat diterapkan melalui peran dan kekuatan negara dalam politik internasional untuk mendapatkan otoritas politik dan loyalitas dalam pasar internasional yang kompetitif. Penulis melihat bahwa kerja sama yang dilakukan Filipina dengan AHA Centre dapat membantu meningkatkan otoritas politiknya di dunia internasional.

## 5. KESIMPULAN

Upaya Filipina melakukan kerja sama manajemen bencana dengan AHA Centre telah berdampak pada peningkatan *place branding* negara tersebut. Filipina yang awalnya dikenal sebagai negara yang tidak aman karena seringnya terjadinya bencana alam, telah menjadi negara yang dikenal aman dalam menghadapi bencana alam. Hal itu karena Filipina mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh AHA Centre dalam manajemen bencana.

Pemerintah Filipina melakukan kerja sama dengan AHA Centre sebagai lembaga dalam membangun kemampuan mitigasi bencana seperti; *preparedness* yaitu penggunaan sistem informasi dan monitoring terkait bencana; *prevention* yaitu penggunaan ASEAN-ERAT sebagai personel untuk melakukan persiapan sebelum terjadinya

bencana; *response* yaitu manajemen yang dilakukan setelah terjadinya bencana seperti sebagai badan penyalur bantuan logistik dan obat-obatan dari negara-negara anggota ASEAN; serta *recovery* yaitu pemulihan daerah terdampak pasca terjadinya bencana. Kerja sama yang dilakukan Filipina dengan AHA Centre telah menunjukkan upaya manajemen bencana untuk perbaikan *place branding* negara tersebut di mata publik internasional.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Anholt, S. (2008). *Place branding : is it Marketing, or isn't it ?*. Retrieved 2020, From: [doi: 10.1057/palgrave.pb.6000088](https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.6000088).

B. Khazai at al. (2017). *Tourism Recovery Scorecard (TOURS) – Banchmarking and Monitoring Progress and Disaster Recovery in Tourism Destination*. International Journal of Disaster Risk Reduction. (hal 2-4)

Carlos dan Salazard. (2015). *Typhoon Yolanda : The Politics of disaster respond dan management*. *Shouteastasian Affairs*. Retrieved 2020 From: <https://search.proquest.com/docview/1771681722/F9076C0C2B945D4PQ/5?accountid=32506>

Coaffe, R, Ham (2008). *Security Branding : The Role of Security in Marketing the City, Region or State*. Retrived 2020.

Coaffee, Rogers. ( 2008). *Reputational Risk and Resiliency : The Branding of Security in Place-Making*. *Cambridge Review of International Affairs*,( 205-217) Retrived 2020.

Ham. V. Petter. (2008). *Place Branding: State of Art*. Retrieved 2021. (126-147)

Hollis, S. (2014). *The global standardization of regional disaster risk management (Hal : 320–331)*. Retrieved 2020.

Oscar F.Picazo. (2013). *Medical Tourism in the Philippines: Market Profile, Benchmarking Exercise, and S.W.O.T Analysis*. Reterved

2020. From: Philippines institute for Development Studies.

McCartney. Glenn J. (2009). *Play the cards, roll the dice - the integration of casinos within Asian tourism destination development strategy*

Rum, Muhammad.(2016). *The Case of Regional Disaster Management Cooperation in ASEAN: A Constructivist Approach to Understanding How International Norms Travel: Southeast Asian Studies*. Retrieved 2021. (491-514).

TRAJANO. J. CAESAR. I. (2016). *BUILDING RESILIENCE FROM WITHIN: ENHANCING HUMANITARIAN CIVILMILITARY COORDINATION IN POSTHAIYAN PHILIPPINES*. Retrieved 2021.

UNDRR. (2019). *Disaster Risk Reduction in the Philippines*. Retrieved 2020, from [https://www.unisdr.org/files/68265\\_682308philippinesdrmsstatusreport.pdf](https://www.unisdr.org/files/68265_682308philippinesdrmsstatusreport.pdf)

Verma. (2020). *Cina's Diplomacy and changing the COVID-19 Narrative*. Retrieved 2020. (pp : 249-255)

Viena D.V Agosto.(2014). *The Philippines' Typhoon Alley: The Historic Bagyos of the Philippines and Their Impac*. Retrieved 2020. 184-216

Yan, at al. (2017). *Monitoring and Assesing Post-Disaster Tourism Recovery Using Geotaged Social Media Data*. Retrieved 2021. From: International Journal of Geo-Information.

Yolanda CRRP (2015). *Yolanda Comperhensive Rehabilitation and Recovery Plan*. Retrieved 2021, From : <http://yolanda.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2015/11/Yolanda-CRRP.pdf> (pp:10,11,12)

## SITUS

AHA Centre. (2016). *Weathering The Perfect Storm Second Edition*. Retrieved 2020. From: <https://ahacentre.org/wp-content/uploads/2016/12/WeatheringThePerfectStormSecondEdition.compressed.pdf>

AHA Centre. (2016). *Weathering The Perfect Storms*. Retrieved 2020. From: <https://ahacentre.org/wpcontent/uploads/2016/>

[12/WeatheringThePerfectStormSecondEdition.compressed.pdf](https://ahacentre.org/wpcontent/uploads/2016/12/WeatheringThePerfectStormSecondEdition.compressed.pdf). (PP : 33-63)

ASEAN.org. (2017). *ASEAN offered support to the Government of the Philippines after Typhoon Haiyan*. Retrieved 2021. From: <https://asean.org/asean-offers-support-to-philippine-government-in-the-wake-of-typhoon-haiyan/>

Asean Breafing. (2017). *Tourism Industry Philippines Part II*. Retrieved 2020. From: <https://www.aseanbriefing.com/news/tourism-industry-philippines-part-ii/>

Asean Breafing. (2017). *Tourism in the Philippines Part I: ASEAN – Bussines*. Retrieved 2020. From: <https://www.aseanbriefing.com/news/tourism-industry-philippines-part/>

Asian Development Bank. (2013). *ADB Economic Working Papers Series : Leveranging Service Sector Growth in the Philipinnes*. Retrieved 2020, from <https://www.adb.org/publications/leveraging-service-sector-growth-philippines>

Asian Disaster Reduction Center (ADRC).(2019). *Informationon Disaster Risk Reduction of Member Country: Phillippines*. Retrieved 2020, From <https://www.adrc.asia/nationinformation.php?NationCode=608&Lang=en#:~:text=Overview%20of%20Disasters,frequent%20earthquakes%20and%20volcanic%20eruptions.>